Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 5, No. 2, November 2026 ISSN: 29622743

Efektivitas Penanganan Tindak Lanjut Hasil Audit Dalam Menurunkan Temuan Audit Berulang pada Organisasi Sektor Publik

(The Effectiveness of Audit Follow-Up Actions in Reducing Repeat Audit Findings in Public Sector Organizations)

Tiara Abdurahman[1], Fityan Halid[2], Mattoasi[3]
[1,2,3]Program Studi Sains Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo
tiaraabdurahman28@gmail.com[1], fityanhalid@gmail.com[2], mattoasi@ung.ac.id[3]

Article Info

Article history:

Received: 11 Juni 2026
Revised: 19 November 2026
Accepted: 20 November 2026

Keywords:

Audit follow-up
Repeat audit findings
Public sector

Kata Kunci:

Tindak lanjut hasil audit
Temuan audit berulang
Sektor publik

Abstract

Repeat audit findings remain a problem in public sector organizations, indicating weaknesses in the management of audit follow-up actions. This study aims to examine the effectiveness of audit follow-up actions in reducing recurring audit findings through a Systematic Literature Review (SLR). The review focuses on factors that shape the implementation and outcomes of audit recommendations. The findings indicate that follow-up effectiveness is influenced by the completion rate of recommendations, the quality of their implementation, improvements in internal control systems, and the organization's capacity to prevent problems from recurring. Effective follow-up contributes to reducing repeat findings by strengthening internal controls, improving compliance with regulations, and fostering organizational learning. Conversely, limited human resource competencies, weak organizational commitment, and inadequate implementation of audit recommendations constrain the effectiveness of follow-up actions. These barriers may allow weaknesses to persist and lead to recurring findings in later audits. The study concludes that effective audit follow-up management is important for addressing the causes of repeated findings and strengthening accountability and overall governance quality in the public sector.

Abstrak

Temuan audit berulang masih menjadi permasalahan di organisasi sektor publik yang menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan tindak lanjut hasil audit. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas tindak lanjut hasil audit dalam mengurangi temuan berulang melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Kajian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan hasil rekomendasi audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut dipengaruhi oleh tingkat penyelesaian rekomendasi, kualitas implementasinya, perbaikan sistem pengendalian internal, serta kemampuan organisasi mencegah terulangnya permasalahan serupa. Tindak lanjut yang efektif berkontribusi dalam mengurangi temuan berulang melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, dan pengembangan pembelajaran organisasi. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya komitmen organisasi, serta lemahnya pelaksanaan rekomendasi audit menghambat efektivitas tindak lanjut. Hambatan tersebut dapat menyebabkan kelemahan mendasar tetap berlangsung dan memunculkan temuan serupa pada audit berikutnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan tindak lanjut hasil audit yang efektif penting untuk mengatasi penyebab temuan berulang sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kualitas tata kelola sektor publik. Hal ini juga mendukung perbaikan kinerja dan

peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara berkelanjutan.

Corresponding Author:

Tiara Abdurahman
Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo
tiaraabdurahman28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Untuk memastikan prinsip tersebut terlaksana dengan baik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada entitas yang diperiksa. Dalam sistem pengawasan sektor publik, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana bagi organisasi untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kualitas tata kelola keuangan. Kurniati dan Abbas (2023) menyatakan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat akuntabilitas organisasi sektor publik. Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak lanjut hasil audit menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara ideal, setiap rekomendasi yang diberikan auditor harus ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tuntas sehingga akar permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan secara permanen. Penanganan tindak lanjut hasil audit tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam organisasi sektor publik. Putra dan Sentosa (2021) menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan upaya perbaikan tata kelola keuangan yang bertujuan mencegah munculnya kembali temuan yang sama pada periode pemeriksaan berikutnya. Oleh karena itu, semakin efektif penanganan tindak lanjut hasil audit, semakin kecil kemungkinan organisasi mengalami temuan audit berulang (*repeat audit findings*).

Namun demikian, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa efektivitas penanganan tindak lanjut hasil audit masih menjadi tantangan bagi banyak organisasi sektor publik. Berbagai laporan pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi audit yang belum diselesaikan secara optimal bahkan bertahan selama bertahun-tahun. Kurniati dan Abbas (2023) mengungkapkan bahwa belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh pergantian pejabat, mutasi pegawai, perubahan regulasi, serta rendahnya komitmen organisasi dalam menyelesaikan rekomendasi audit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola yang efektif.

Kurangnya efektivitas penanganan tindak lanjut hasil audit berdampak pada munculnya temuan audit berulang pada berbagai instansi pemerintah. Husni et al. (2022) menemukan bahwa temuan berulang pada pemeriksaan Inspektorat dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi aparatur, lemahnya komunikasi antara auditor dan auditee, kurangnya komitmen pimpinan, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Temuan serupa disampaikan oleh Silalahi dan Nuswantara (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya integritas aparatur, lemahnya pengendalian internal, serta ketidakjelasan aturan menjadi penyebab utama munculnya temuan berulang dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kegagalan organisasi dalam menangani tindak lanjut hasil audit secara efektif menyebabkan permasalahan yang sama terus muncul pada periode pemeriksaan berikutnya.

Fenomena ini juga terlihat pada berbagai pemerintah daerah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih menghadapi temuan yang berulang dari tahun ke tahun. Rika (2025) menemukan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut hasil audit yang belum optimal masih menjadi penyebab munculnya temuan audit pada pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian opini audit yang baik tidak selalu diikuti oleh efektivitas penyelesaian permasalahan yang menjadi temuan auditor. Dengan kata lain, keberhasilan audit seharusnya tidak hanya diukur dari opini yang diperoleh, tetapi juga dari efektivitas penanganan tindak lanjut rekomendasi yang mampu mencegah terulangnya permasalahan yang sama. Selain berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah, temuan audit berulang juga dapat menjadi indikator lemahnya sistem pengawasan dan meningkatnya risiko penyimpangan. Angela et al. (2023)

menjelaskan bahwa temuan audit yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi berpotensi meningkatkan risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanganan tindak lanjut hasil audit dalam menurunkan temuan audit berulang pada organisasi sektor publik melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran tindak lanjut hasil audit sebagai instrumen perbaikan tata kelola serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan ***Systematic Literature Review*** **(SLR)** sebagai metode kajian literatur. SLR merupakan metode yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui proses identifikasi, penilaian kritis, serta sintesis terhadap berbagai studi yang relevan dengan topik penelitian (Kitchenham & Charters, 2007).

Pengumpulan data penelitian menggunakan softcopy edition yang proses pencarian *(search process)* memanfaatkan software *Perish or Publish* (POP) pada situs Google Scholar dengan kata kunci Tindak Lanjut Hasil Audit dan Repeat Audit Findings. Literature yang dipilih yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil audit, temuan berulang dan Sektor Publik pada periode 2021-2026. Terfilter sebanyak 100 paper menjadi 10 paper pada jurnal yang bereputasi SINTA dan Science direct serta relevan dengan penelitian.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan penelitian pada bidang yang dikaji sekaligus menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan. Adapun *research question* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1) **RQ1.** Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya temuan audit berulang (*repeat audit findings*) pada organisasi sektor publik?
2) **RQ2.** Bagaimana Efektivitas Penanganan Tindak Lanjut Hasil Audit Pada Organisasi Sektor Publik Berdasarkan Temuan Penelitian Terdahulu?
3) **RQ3.** Bagaimana Peran Penanganan Tindak Lanjut Hasil Audit Dalam Menurunkan Temuan Audit Berulang Pada Organisasi Sektor Publik?
4) **RQ4.** Apa agenda penelitian masa depan yang dapat dikembangkan terkait temuan audit berulang dan tindak lanjut hasil audit pada sektor publik?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Audit Berulan *(Repeat Audit Findings)* Pada Organisasi Sektor Publik

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa temuan audit berulang pada organisasi sektor publik tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, serta tata kelola pemerintahan. Salah satu faktor fundamental yang memengaruhi munculnya temuan audit berulang adalah keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan sektor publik karena seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, hingga penyelesaian rekomendasi audit melibatkan kemampuan dan kompetensi aparatur yang menjalankan fungsi tersebut. Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam memahami, menerapkan, dan mempertanggungjawabkan setiap proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jatmiko et al. (2023) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur merupakan aspek penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkualitas, karena kompetensi yang memadai memungkinkan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dilaksanakan secara lebih tepat dan akuntabel.

Keterbatasan kompetensi aparatur dapat menyebabkan berbagai kesalahan dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, seperti ketidaktepatan pencatatan transaksi, ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, kesalahan dalam pengklasifikasian anggaran, serta ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika aparatur tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur pengelolaan keuangan, standar akuntansi, maupun mekanisme pengendalian internal, potensi terjadinya kesalahan administratif dan penyimpangan semakin meningkat. Hutahaean et al. (2025) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada

keberadaan standar yang mengatur proses pelaporan, tetapi juga pada kemampuan aparatur untuk mengimplementasikan standar tersebut dalam praktik pengelolaan keuangan. Dalam konteks audit sektor publik, ketidakmampuan aparatur menerapkan ketentuan secara konsisten berpotensi menimbulkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang kemudian teridentifikasi sebagai temuan pemeriksaan. Apabila kelemahan kompetensi tersebut tidak diatasi melalui peningkatan kapasitas dan perbaikan prosedur kerja, kesalahan yang sama berpotensi terjadi kembali pada periode berikutnya sehingga menghasilkan temuan audit berulang.

Silalahi dan Nuswantara (2024) mengidentifikasi bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia perangkat pemerintah desa, rendahnya integritas dan nilai etika aparatur, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia auditor merupakan faktor yang berkontribusi terhadap munculnya temuan berulang dalam pengelolaan APBDes. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan temuan audit berulang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis aparatur dalam menjalankan prosedur administrasi, tetapi juga berhubungan dengan aspek integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kompetensi teknis memungkinkan aparatur melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, sedangkan integritas dan nilai etika menjadi dasar bagi aparatur untuk menjalankan tanggung jawab secara jujur, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika kedua aspek tersebut tidak berjalan secara optimal, organisasi menghadapi risiko kesalahan pengelolaan yang lebih besar serta kesulitan dalam memastikan bahwa rekomendasi audit benar-benar dilaksanakan secara substantif. Oleh karena itu, kompetensi dan integritas aparatur merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan publik yang akuntabel.

Selain kompetensi teknis dan integritas, keterbatasan jumlah personel juga dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang tersedia dapat menyebabkan proses administrasi, verifikasi dokumen, pengawasan transaksi, dan penyelesaian rekomendasi audit tidak dilaksanakan secara optimal. Silalahi dan Nuswantara (2024) juga mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah auditor menjadi salah satu penyebab munculnya temuan berulang dari perspektif auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan internal. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi cakupan dan intensitas pengawasan, khususnya ketika auditor harus menangani banyak entitas atau permasalahan dalam waktu yang terbatas. Dalam kondisi demikian, organisasi menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa kelemahan pengelolaan keuangan dapat teridentifikasi secara memadai dan memperoleh perhatian dalam proses perbaikan. Di sisi auditee, keterbatasan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang pengelolaan keuangan juga dapat menyebabkan proses tindak lanjut rekomendasi audit tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, keterbatasan kuantitas SDM, baik pada pihak auditor maupun entitas yang diperiksa, dapat memperbesar risiko tidak terselesaikannya kelemahan pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Permasalahan kapasitas SDM juga berkaitan dengan keberlanjutan pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi sektor publik. Putra dan Sentosa (2021) mengidentifikasi bahwa faktor sumber daya manusia, mutasi pegawai, serta lemahnya koordinasi menjadi kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Mutasi dan pergantian pegawai yang tidak disertai mekanisme transfer pengetahuan yang memadai dapat menyebabkan hilangnya pemahaman mengenai permasalahan yang pernah ditemukan auditor, status penyelesaian rekomendasi, serta tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pejabat atau pegawai yang baru menjalankan tugas tidak memiliki informasi yang cukup untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan sebelumnya. Penelitian Saputra et al. (2021) mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan, kompetensi SDM, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa juga menekankan pentingnya kompetensi aparatur dalam mendukung proses pelaporan keuangan yang akuntabel. Kompetensi aparatur dan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan perlu berjalan secara beriringan agar proses pencatatan, penyajian, dan pertanggungjawaban informasi keuangan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila pengetahuan dan keterampilan pegawai tidak terpelihara serta tidak didukung koordinasi yang memadai, maka organisasi berpotensi kehilangan kesinambungan dalam menyelesaikan rekomendasi audit dan mengulang kesalahan yang telah terjadi pada periode sebelumnya.

Keterbatasan kompetensi SDM pada akhirnya dapat menyebabkan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan secara formalitas tanpa disertai pemahaman yang memadai terhadap substansi rekomendasi auditor. Aparatur mungkin dapat melengkapi dokumen yang diminta atau menyampaikan bukti penyelesaian rekomendasi, tetapi belum tentu mampu mengidentifikasi kelemahan prosedur yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Novalia dan Nahar (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, bersama dengan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi, pengawasan fungsional, dan sistem pengendalian internal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur perlu didukung oleh lingkungan pengelolaan dan sistem organisasi yang memadai agar dapat menghasilkan akuntabilitas yang

lebih baik. Dalam konteks tindak lanjut audit, perbaikan yang hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen tanpa disertai pemahaman terhadap akar permasalahan berpotensi menghasilkan perbaikan yang bersifat sementara dan tidak menyentuh penyebab utama temuan. Ketika rekomendasi audit tidak dipahami sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan sistem, melainkan hanya sebagai kewajiban administratif, maka organisasi berpotensi kembali menghadapi permasalahan serupa pada periode pemeriksaan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dapat dipahami sebagai salah satu faktor mendasar yang memengaruhi terjadinya temuan audit berulang pada organisasi sektor publik. Kompetensi teknis, integritas, kecukupan jumlah personel, pengalaman kerja, kesinambungan pengetahuan, serta kemampuan berkoordinasi merupakan aspek yang saling berkaitan dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil audit. Hasil penelitian Jatmiko et al. (2023), Hutahaean et al. (2025), serta Silalahi dan Nuswantara (2024) secara bersama-sama memperlihatkan pentingnya kapasitas aparatur dalam mendukung kualitas pengelolaan keuangan dan mencegah kelemahan organisasi. Oleh karena itu, upaya mengurangi temuan audit berulang tidak cukup hanya melalui penyampaian rekomendasi auditor atau penetapan prosedur formal, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi, transfer pengetahuan antarpegawai, peningkatan integritas, serta pembagian tugas yang sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing personel. Penguatan aspek SDM tersebut diharapkan dapat mendorong organisasi sektor publik untuk tidak hanya menyelesaikan temuan audit secara administratif, tetapi juga mampu memperbaiki proses pengelolaan keuangan dan mencegah terulangnya kelemahan yang sama.

3.2 Efektivitas Penanganan Tindak Lanjut Hasil Audit Pada Organisasi Sektor Publik Berdasarkan Temuan Penelitian Terdahulu

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa efektivitas penanganan tindak lanjut hasil audit pada organisasi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh tingkat penyelesaian rekomendasi audit, tetapi juga oleh kualitas implementasi rekomendasi, ketepatan waktu pelaksanaan, perubahan terhadap sistem pengelolaan organisasi, serta kemampuan entitas dalam mencegah terulangnya permasalahan yang sama. Tindak lanjut hasil audit merupakan bagian penting dari siklus pengawasan karena rekomendasi yang dihasilkan auditor pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki kelemahan pengelolaan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan memperkuat akuntabilitas organisasi. Dalam perspektif tata kelola sektor publik, efektivitas tindak lanjut audit perlu dipahami sebagai kemampuan organisasi untuk menerjemahkan rekomendasi auditor menjadi tindakan korektif yang memberikan perubahan nyata terhadap proses, sistem, dan kinerja organisasi. Dengan demikian, keberhasilan tindak lanjut audit tidak semata-mata diukur berdasarkan terpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga berdasarkan sejauh mana rekomendasi tersebut mampu mengatasi akar permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya.

Putra dan Sentosa (2021) menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tindak lanjut rekomendasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kelemahan yang teridentifikasi melalui proses pemeriksaan memperoleh penanganan yang memadai sehingga tidak terus berulang pada periode berikutnya. Oleh karena itu, penyelesaian rekomendasi audit seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban entitas yang diperiksa untuk memenuhi permintaan auditor, tetapi juga sebagai proses pembelajaran dan perbaikan organisasi. Ketika rekomendasi audit ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi penyebab utama permasalahan, memperbaiki prosedur yang tidak memadai, dan memperkuat mekanisme pengendalian, organisasi memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Sebaliknya, apabila tindak lanjut hanya dilakukan melalui pemenuhan dokumen tanpa disertai perubahan terhadap prosedur atau sistem yang menjadi sumber kelemahan, maka penyelesaian rekomendasi tersebut berpotensi tidak memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap organisasi.

Efektivitas tindak lanjut hasil audit juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan dan pelayanan publik. Furqan et al. (2020), melalui penelitian terhadap 491 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dengan 1.437 observasi selama periode 2014–2016, menemukan bahwa temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh positif terhadap kedua aspek tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yang ditemukan auditor, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas informasi keuangan dan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas tindak lanjut audit memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian administrasi pemeriksaan, karena implementasi rekomendasi dapat berkontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat (Furqan et al., 2020).

Sejalan dengan temuan tersebut, Pertiwi dan Wibowo (2022) mengkaji hubungan antara temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, kualitas laporan keuangan, dan kualitas pelayanan publik pada 34 kementerian dan lembaga di Indonesia selama periode 2015–2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit tidak menunjukkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, tindak lanjut rekomendasi audit ditemukan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbedaan hasil tersebut memberikan pemahaman bahwa efektivitas tindak lanjut audit dapat menghasilkan dampak yang berbeda pada setiap aspek kinerja organisasi. Implementasi rekomendasi audit belum tentu secara langsung menghasilkan perubahan kualitas laporan keuangan, tetapi dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik melalui perbaikan proses kerja, penanganan kelemahan operasional, dan peningkatan respons organisasi terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut audit tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu indikator, melainkan perlu memperhatikan berbagai dimensi hasil yang diharapkan dari implementasi rekomendasi auditor (Pertiwi & Wibowo, 2022).

Meskipun tindak lanjut rekomendasi audit berpotensi menghasilkan perbaikan organisasi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala internal dan eksternal. Kurniati dan Abbas (2023) menemukan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK masih menghadapi kendala berupa mutasi pegawai, pergantian pejabat, perubahan regulasi, serta rendahnya komitmen organisasi dalam menyelesaikan rekomendasi audit. Kondisi tersebut dapat menghambat kesinambungan proses tindak lanjut karena rekomendasi yang telah diberikan auditor tidak selalu memperoleh perhatian dan penanganan yang konsisten dari pihak yang bertanggung jawab. Pergantian pejabat atau pegawai, misalnya, dapat menyebabkan terputusnya informasi mengenai status rekomendasi, hilangnya pengetahuan terkait permasalahan sebelumnya, serta berubahnya prioritas penyelesaian rekomendasi. Oleh karena itu, efektivitas tindak lanjut audit membutuhkan dukungan mekanisme kelembagaan yang memastikan setiap rekomendasi memiliki penanggung jawab, target waktu penyelesaian, sistem pemantauan, serta dokumentasi yang dapat diteruskan meskipun terjadi perubahan personel atau struktur organisasi.

Efektivitas tindak lanjut hasil audit juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam melaksanakan rekomendasi secara konkret. Husni et al. (2022) menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi aparatur, lemahnya komunikasi antara auditor dan auditee, kurangnya komitmen pimpinan, serta lemahnya sistem pengendalian internal menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rekomendasi auditor tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan apabila organisasi tidak memiliki kemampuan, sumber daya, dan komitmen yang memadai untuk mengimplementasikannya. Komunikasi antara auditor dan auditee menjadi penting dalam memastikan bahwa rekomendasi dipahami secara tepat, termasuk mengenai permasalahan yang harus diselesaikan, tindakan yang diperlukan, dan bukti yang harus disiapkan untuk menunjukkan bahwa perbaikan telah dilakukan. Apabila rekomendasi tidak dipahami secara memadai atau tidak disertai koordinasi yang efektif, tindak lanjut audit berpotensi mengalami keterlambatan, dilaksanakan secara tidak tepat, atau hanya memenuhi persyaratan administratif tanpa menyelesaikan akar permasalahan.

Syarifuddin (2026) memberikan perspektif yang lebih luas dengan menempatkan tindak lanjut audit sebagai proses akuntabilitas berlapis yang tidak seharusnya berhenti pada penutupan administratif rekomendasi. Dalam kerangka konseptual yang dikembangkan, tindak lanjut audit mencakup empat tingkat yang saling berkaitan, yaitu koreksi administratif, perbaikan tata kelola dan pengendalian, peningkatan kinerja dan pelayanan, serta kontribusi terhadap nilai publik (*public value*). Perspektif ini memperlihatkan bahwa penyelesaian rekomendasi audit merupakan tahap awal dari proses perbaikan, sedangkan keberhasilan yang lebih substantif ditunjukkan melalui perubahan terhadap sistem pengelolaan, peningkatan kinerja organisasi, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, suatu rekomendasi dapat dinyatakan telah selesai secara administratif, tetapi belum tentu menunjukkan bahwa organisasi telah mengalami perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Penilaian efektivitas tindak lanjut audit perlu mempertimbangkan kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan rekomendasi serta dampak perubahan yang dihasilkan terhadap organisasi (Syarifuddin, 2026).

Perspektif tersebut juga sejalan dengan hasil kajian Haryanto et al. (2026) yang melakukan systematic literature review terhadap penelitian mengenai rekomendasi audit sektor publik. Berdasarkan sintesis terhadap 60 artikel yang diperoleh dari Scopus dan Google Scholar, penelitian tersebut mengidentifikasi lima tema utama, yaitu efektivitas tindak lanjut, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi rekomendasi, pencegahan korupsi, peran lembaga pemeriksa tertinggi, serta audit kinerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit umumnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas publik, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda atau bergantung pada konteks organisasi. Selain itu, komitmen pimpinan, kompetensi auditor, dan independensi audit merupakan faktor kelembagaan yang berperan penting dalam implementasi rekomendasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas tindak lanjut audit merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik organisasi, lingkungan kelembagaan, serta kemampuan entitas dalam merespons rekomendasi auditor. Oleh karena itu, tingkat penyelesaian rekomendasi perlu dianalisis

dengan mempertimbangkan konteks dan kualitas implementasinya, bukan hanya diperlakukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan tindak lanjut audit (Haryanto et al., 2026).

Selain faktor kapasitas organisasi dan komitmen kelembagaan, efektivitas tindak lanjut audit juga berkaitan dengan kemampuan organisasi mengintegrasikan rekomendasi ke dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Silalahi dan Nuswantara (2024) menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya integritas aparatur, lemahnya pengendalian internal, dan ketidakjelasan aturan turut memengaruhi penanganan permasalahan yang berkaitan dengan temuan audit berulang. Ketika organisasi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan rekomendasi auditor, tindak lanjut yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tindak lanjut audit membutuhkan keterkaitan antara rekomendasi auditor, perbaikan prosedur kerja, penguatan pengendalian internal, dan perubahan perilaku aparatur. Dengan demikian, tindak lanjut audit yang efektif harus mampu mendorong organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap penyebab kelemahan, menentukan tindakan perbaikan yang relevan, serta memastikan bahwa perubahan tersebut diterapkan secara konsisten dalam proses pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, Yanti dan Ardillah (2024) menemukan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan terhadap 480 pemerintah kabupaten dan kota pada periode 2021–2022 tersebut menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelayanan. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas tindak lanjut audit memiliki relevansi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, tindak lanjut rekomendasi audit dapat menjadi salah satu mekanisme yang mendorong organisasi sektor publik untuk memperbaiki kelemahan pengelolaan, meningkatkan kualitas informasi keuangan, serta memperkuat proses penyelenggaraan pelayanan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan tindak lanjut audit perlu dilihat dari perubahan yang dihasilkan pada kualitas proses dan hasil organisasi, bukan semata-mata dari status penyelesaian rekomendasi (Yanti & Ardillah, 2024).

Berdasarkan keseluruhan literatur, efektivitas penanganan tindak lanjut hasil audit dapat dipahami melalui empat indikator utama yang saling berkaitan. Pertama, ketuntasan penyelesaian rekomendasi audit, yang menunjukkan sejauh mana organisasi mampu memenuhi rekomendasi auditor sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang ditetapkan. Kedua, kualitas implementasi rekomendasi, yang mencerminkan kesesuaian tindakan perbaikan dengan akar permasalahan yang ditemukan auditor, sehingga tindak lanjut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi. Ketiga, perbaikan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi, yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam memperbaiki prosedur, memperkuat pengawasan, dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan serupa. Keempat, kemampuan organisasi mencegah munculnya kembali permasalahan yang sama, yang merupakan indikator substantif dari keberhasilan tindak lanjut audit dalam menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut hasil audit tidak hanya berkaitan dengan tingkat penyelesaian rekomendasi, tetapi juga dengan kualitas perubahan yang dihasilkan terhadap sistem pengelolaan organisasi.

3.3 Peran Penanganan Tindak Lanjut Hasil Audit Dalam Menurunkan Temuan Audit Berulang Pada Organisasi Sektor Publik?

Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan tindak lanjut hasil audit memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan temuan audit berulang (*repeat audit findings*) pada organisasi sektor publik. Secara konseptual, rekomendasi audit diberikan untuk memperbaiki kelemahan sistem, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, serta menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, efektivitas tindak lanjut hasil audit menjadi faktor penentu dalam mencegah munculnya kembali temuan yang sama pada periode pemeriksaan berikutnya.

Putra dan Sentosa (2021) menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit merupakan instrumen perbaikan tata kelola keuangan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya temuan berulang. Ketika rekomendasi audit ditindaklanjuti secara tepat waktu dan menyeluruh, organisasi dapat memperbaiki kelemahan pengendalian internal, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Sebaliknya, ketika tindak lanjut audit tidak dilakukan secara optimal, akar permasalahan yang ditemukan auditor tetap berada dalam sistem organisasi dan berpotensi muncul kembali sebagai temuan audit berulang. Kurniati dan Abbas (2023) menunjukkan bahwa banyak rekomendasi audit yang belum terselesaikan meskipun telah berusia lebih dari beberapa tahun. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas tindak lanjut audit menjadi rendah dan mengurangi fungsi rekomendasi audit sebagai instrumen perbaikan organisasi. Ketika rekomendasi tidak diimplementasikan secara tuntas, organisasi cenderung mengalami permasalahan yang sama pada periode audit berikutnya.

Peran tindak lanjut hasil audit dalam menurunkan temuan audit berulang juga terlihat dari penelitian Rika (2025) yang menemukan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan belum optimalnya tindak lanjut hasil audit masih menjadi penyebab munculnya temuan audit pada pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun organisasi telah memperoleh opini WTP, keberhasilan tersebut belum tentu mencerminkan efektivitas penyelesaian akar permasalahan yang ditemukan auditor. Dengan kata lain, keberhasilan tindak lanjut audit lebih penting dalam menurunkan temuan berulang dibandingkan sekadar pencapaian opini audit yang baik.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian internasional Waddell (2024) yang menunjukkan bahwa temuan audit berulang tetap terjadi ketika organisasi gagal mengintegrasikan rekomendasi audit ke dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas tindak lanjut audit tidak hanya bergantung pada penyelesaian formal rekomendasi, tetapi juga pada sejauh mana organisasi mampu menjadikan rekomendasi audit sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (*organizational learning*).

Berdasarkan sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak lanjut hasil audit berperan sebagai mekanisme utama dalam menurunkan temuan audit berulang melalui tiga jalur utama, yaitu: (1) memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal, (2) meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (3) mendorong proses pembelajaran organisasi melalui implementasi rekomendasi audit. Semakin efektif penanganan tindak lanjut hasil audit, semakin besar kemampuan organisasi sektor publik untuk mengurangi frekuensi temuan audit berulang dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik.

3.4 Agenda Penelitian Masa Depan Yang Dapat Dikembangkan Terkait Temuan Berulang Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Sector Publik

Tabel 1. Agenda Penelitian Masa Depan Terkait Temuan Berulang dan Tindak Lanjut Hasil Audit

No	Research Gap	Temuan Literatur	Agenda Penelitian Masa Depan	Kontribusi yang Diharapkan
1	Sebagian besar penelitian menjelaskan temuan audit berulang dari perspektif kepatuhan dan pengendalian internal.	Temuan audit berulang umumnya dikaitkan dengan lemahnya SPI, kompetensi SDM, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Mengembangkan penelitian menggunakan *Organizational Learning Theory* untuk menjelaskan kegagalan organisasi dalam belajar dari rekomendasi audit.	Menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar penyebab temuan audit berulang.
2	Penelitian terdahulu masih menguji faktor-faktor penyebab tindak lanjut audit secara parsial.	Kompetensi SDM, kapabilitas APIP, komitmen pimpinan, dan kualitas SPI terbukti memengaruhi tindak lanjut hasil audit.	Mengembangkan model empiris yang menguji peran mediasi efektivitas tindak lanjut audit terhadap hubungan faktor organisasi dan temuan audit berulang.	Memperjelas mekanisme hubungan antara faktor organisasi dan kemunculan temuan audit berulang.
3	Hubungan antara temuan audit berulang dan korupsi masih jarang diteliti secara langsung.	Temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terbukti berkaitan dengan tingkat korupsi pemerintah daerah.	Meneliti pengaruh *repeat audit findings* terhadap risiko korupsi dan fraud pada sektor publik.	Menghasilkan indikator dini (*early warning indicator*) terhadap potensi korupsi daerah.
4	Kajian mengenai digitalisasi monitoring tindak lanjut audit masih terbatas.	Pemantauan tindak lanjut audit masih didominasi mekanisme administratif dan manual.	Mengembangkan penelitian mengenai dashboard monitoring audit, *audit analytics*, dan *early warning system*.	Mendukung transformasi digital pengawasan sektor publik.
5	Audit masih diposisikan sebagai instrumen deteksi, bukan pencegahan.	Tindak lanjut audit sering berorientasi pada penyelesaian administratif rekomendasi.	Mengembangkan model *preventive governance* berbasis hasil audit dan manajemen risiko.	Mendorong pergeseran paradigma dari korektif menjadi preventif dalam tata kelola

				publik.
6	Penelitian masih didominasi studi kasus pada pemerintah daerah tertentu.	Sebagian besar studi menggunakan objek tunggal atau wilayah tertentu.	Melakukan studi komparatif lintas daerah, lintas negara, atau lintas level pemerintahan.	Meningkatkan generalisasi hasil penelitian dan memperkaya literatur sektor publik.
7	Belum banyak penelitian yang mengaitkan temuan audit berulang dengan kualitas tata kelola pemerintahan.	Temuan audit berulang lebih sering diposisikan sebagai variabel dependen.	Menguji pengaruh temuan audit berulang terhadap akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, dan kinerja pemerintah daerah.	Memperluas pemahaman mengenai dampak strategis temuan audit berulang terhadap organisasi publik.

Temuan audit berulang dan tindak lanjut hasil audit pada sektor publik masih didominasi oleh kajian yang berfokus pada aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan penyelesaian rekomendasi audit, sementara penelitian yang mengkaji proses pembelajaran organisasi, digitalisasi pengawasan, serta dampak strategis temuan audit berulang terhadap tata kelola pemerintahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang perlu diarahkan pada pengembangan perspektif *Organizational Learning Theory*, pengujian model hubungan antara faktor organisasi, efektivitas tindak lanjut audit, dan temuan audit berulang, serta eksplorasi keterkaitan temuan audit berulang dengan risiko korupsi, kualitas tata kelola, dan kinerja pemerintah daerah. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat memperluas literatur audit sektor publik sekaligus menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa temuan audit berulang (*repeat audit findings*) pada organisasi sektor publik tidak hanya disebabkan oleh kegagalan tindak lanjut hasil audit, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, seperti rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya komitmen pimpinan, kurang optimalnya koordinasi antarunit, serta ketidakmampuan organisasi dalam menginternalisasi rekomendasi audit ke dalam proses perbaikan tata kelola. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kegagalan tindak lanjut hasil audit menyebabkan akar permasalahan yang ditemukan auditor tidak terselesaikan secara tuntas sehingga kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Dengan demikian, temuan audit berulang dapat dipandang sebagai indikator lemahnya kapasitas pembelajaran organisasi dan efektivitas tata kelola sektor publik.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi sektor publik perlu memperkuat mekanisme penanganan tindak lanjut hasil audit melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta peningkatan komitmen pimpinan dalam memastikan penyelesaian rekomendasi audit secara tepat waktu dan tuntas. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau progres tindak lanjut rekomendasi audit secara berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian empiris mengenai hubungan antara efektivitas tindak lanjut hasil audit dan penurunan temuan audit berulang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji peran *organizational learning*, digitalisasi pengawasan, serta pengaruh efektivitas tindak lanjut hasil audit terhadap kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah daerah guna memperkaya literatur audit sektor publik.

REFERENSI

Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). *Pengaruh Temuan Audit , Opini Audit , Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi*, *4*(2), 506–525. https://doi.org/10.21009/japa.0402.11

Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Etyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, *33*(5), 535–559. https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173

Haryanto, H., Kurniawan, T., & Salomo, R. V. (2026). Public sector audit recommendations: A systematic literature review based on Scopus and Google Scholar. *Lentera Negeri*, *7*(1), 59–73. https://doi.org/10.29210/991720

Husni, M., Idayu, R., & Supriyatna, N. (2022). Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat. *OWNER Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *6*, 4062–4070. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019

Hutahaean, M. O., Manurung, A., & Saribu, A. D. (2025). Assessing the impact of accounting standards and human capital on public financial reporting quality in Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*, *5*(3), 678–690. https://doi.org/10.52970/grdis.v5i3.1590

Jatmiko, B., Utami, T. P., & Nugroho, A. W. (2023). Determinants of the quality of village government financial statements. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, *13*(12), 184–194. https://doi.org/10.26714/mki.13.2.2023.184-194?utm_source=chatgpt.com

Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering

Kurniati, S., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK sebagai Key Performance Indicator. *OWNER Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *7*(Gambar 1), 3461–3471. https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1632

Novalia, I. A., & Nahar, A. (2022). The influence of presentation of financial statements, accessibility, functional oversight, competence of human resources, and internal control systems on the accountability of village financial managemen. *Urnal Rekognisi Akuntansi*, *6*(2), 194–209. https://doi.org/10.34001/jra.v6i2.443

Pertiwi, P. K., & Wibowo, P. (2022). Government reporting and quality of public services: Are they twins? *Ournal of Accounting and Investment*, *24*(1), 1–24. https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16193

Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *ProBank Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, *1*(1), 120–128. https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879

Rika, A. R. (2025). Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sulawesi Tenggara Ta 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Barelang*, *10*(1), 13–23. https://doi.org/10.33884/jab.v10i1.10881

Silalahi, R. A. ., & Nuswantara, D. A. (2024). Analisis Penyebab Temuan Berulang Apbdes Pada Audit Internal Inspektorat Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(201), 1169–1187. https://doi.org/10.5281/zenodo.14590871 p-ISSN:

Syarifuddin, I. (2026). Reframing audit follow-up in Indonesian public sector auditing: An impact-oriented conceptual framework. *Urnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, *12*(1). https://doi.org/10.28986/jtaken.v12i1.2810

Waddell, M. A. (2024). Repeat audit findings: How FEMA responds to feedback. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *100*. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104157

Yanti, H. B., & Ardillah, B. I. (2024). The impact of audit findings and recommendation follow-up on public service quality: An empirical investigation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *19*(2), 278–292. https://doi.org/10.24843/JIAB.2024.v19.i02.p06